

PENGEMBANGAN KONSTRUKSI *CONTENTIOUS POLITIC THEORY* DALAM KONTESTASI DEMOKRASI POLITIK LOKAL PASCA REFORMASI POLITIK 1998

Rizal A. Hidayat

Departemen Pengembangan Executive, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang kebun jeruk, Jakarta 11510
rizal.hidayat@esaunggul.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan konstruksi bangunan *Contentious Politic Theory* dalam merespon konsolidasi demokrasi di tingkat lokal pasca reformasi politik 1998. Dalam fase konsolidasi ini, terjadi pergeseran relasi antara pusat-daerah yang bermuara pada pergeseran locus *state formation* dan *social formation*. Pergeseran tersebut berada pada aras locus kemunculan sinisme dan *dis-trust* sebagai modal dasar *re-positioning* daerah kepada pusat. Implikasi *re-positioning* yang terjadi kemudian adalah terjadinya konflik kepentingan bermuatan kekuatan simbolik lokal seperti atavisme dan indigenisme dalam menguatkan posisi konflik. Kekuatan-kekuatan simbolik tersebut kemudian digerakkan oleh para *local strongment* sebagai modus operandi gerakan perseteruan politik dengan mengeksistensikan persaingan kekuatan politik mereka dalam mengontrol dan mengendalikan konstelasi politik lokal. Konstelasi politik yang dijabarkan dalam konteks dan motif gerakan politik di antara para *local strongment* (aktor-aktor politik lokal) inilah yang memetakan tipologi *contentious politic*. Perkembangan tipologi *Contentious Politic* ini adalah *konflik vertikal-horizontal* skala mikro dan makro, berikut juga *konflik horizontal-vertikal* skala mikro dan makro.

Kata Kunci: *contentious politic theory*, kontestasi politik, konflik vertikal-horizontal

Pendahuluan

Kondusifitas iklim demokratisasi pada aras demokrasi lokal yang berkembang melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat penting untuk memetakan identifikasi dan klasifikasi ketahanan perkembangan otonomi daerah. Dengan kata lain perkembangan otonomi daerah mencerminkan suatu konsolidasi demokrasi yang sebelumnya mengalami kondisi *defected* oleh orde sistem politik sebelumnya yang sentralistis. Proses transisi politik yang berlangsung sejak bulan Mei 1998 menimbulkan implikasi pada pergeseran *state formation* dan *social formation*, baik pada aras lokal maupun nasional.

Pada aras nasional, terjadi pergeseran tata hubungan kekuasaan antar institusi politik utama ke arah sistem parle-

mentariaisme, maupun antar pusat (*centre*) dengan daerah-lokalitas (*periphery*). Pergeseran locus politik itu berjalan beriringan dengan menurunnya kredibilitas (*loss of legitimacy*) dari Negara dan institusinya. Penurunan kredibilitas negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari *pertama*, pola pengaturan politik (rejitimasi) pada masa orde baru yang dianggap melakukan marginalisasi, tidak hanya pada warga negara dalam tata hubungan *state-society*, melainkan juga pada komunitas *local* (masyarakat adat) di daerah. *Kedua*, terjadinya fragmentasi yang luas pada semua arena institusi kenegaraan pada era pasca orde baru akibat terbangunnya kontestasi antar aktor-aktor politik. *Loss of legitimacy* dari negara (*state*) menghasilkan sinisme dan *distrust*

yang meluas pada negara dan institusi kenegaraannya (Dwipayana, 2006).

Di tengah menurunnya legitimasi negara, daerah melakukan *re-positioning* terhadap hubungan mereka dengan pusat. Rumusan reposisi inilah yang kemudian menghasilkan konflik antar pusat-daerah, baik dalam domain ekonomi, sumber daya politik, serta tentu saja dalam arena kebudayaan. Instrumen yang digunakan oleh daerah untuk memperkuat posisinya bersumber dari kekuatan simbolik melalui konstruksi budaya yang berbasiskan pada *atavisme* (mencari pada sejarah masa lalu) dan *indigenisme* (kesamaan geneologis). Indonesia menemukan momentum implementasi penerapannya semenjak arus konsolidasi demokrasi ditekankan kepada sistem politik yang menganut perspektif desentralisasi kekuasaan. Dikenal dengan otonomi daerah yang berusaha menguatkan berbagai entitas elemen-elemen identitas lokal pembentuk konstelasi politik lokal dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia yang sebelumnya berada pada suatu sistem politik yang sentralistis, elitis dan represif dalam implementasinya. Hal ini berkaitan dengan sejumlah prasyarat konsolidasi menuju demokrasi. Setidaknya terdapat lima syarat konsolidasi menuju demokrasi (Maliki, 2010), yaitu :

1. Sistem politik yang memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik
2. Ada kesepakatan mengenai aturan main politik dan semua pihak mematuinya
3. Pihak-pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah
4. Kemiskinan di masyarakat dapat diminimalkan
5. Perpecahan etnik, kultural atau religiusnya tidak mendalam dan bisa dikompromikan

Dalam perkembangannya, hubungan antar lini di atas sebagai syarat kon-

solidasi demokrasi lokal tersebut perannya juga sangat ditentukan oleh eksistensi para aktor lokal. Para aktor lokal ini adalah pertama, peran *civil society* (organisasi keagamaan, media massa lokal, organisasi masyarakat berdasarkan identitas etnis dan agama). *Kedua*, Peran birokrat. *Ketiga*, peran elit ekonomi lokal dan nasional (Hadi, 2011). Eksistensi ketiga aktor demokrasi lokal tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai friksi kepentingan sebagai eksese korelasi di antara ketiganya. Dalam ranah *contentious politic*, ketiga aktor demokrasi lokal tersebut (*the local strongmen*) tidak jarang saling berkompetisi melalui peran aktifnya dalam *stationery bandits* dan *roving bandits* (meminjam istilah Olson dalam *Power And Prosperity*, 2003) dalam arena perebutan *sphere of influence* untuk menciptakan dan mengendalikan *state formation* dan *social formation* pada aras politik lokal.

Perubahan haluan dari “politik lama” yang ter-sentralisasi dan terkontrol kepada “politik baru” yang lebih terdesentralisasi dan egaliter membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia. Setidaknya pada tahun-tahun pertama reformasi. Namun setelah melewati “bulan madu” reformasi yang sebentar, beberapa sarjana segera menangkap pertumbuhan besar para *broker politik* dan *local strongmen* di level lokal, yang mulai mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik lokal. Para broker dan local strongmen yang mengambil alih kekosongan pemain dalam arena politik lokal pada orde reformasi biasanya adalah broker lama yang pada masa sebelumnya tidak mampu atau tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan *local strongmen* sokongan rejim orde baru. Sedangkan, broker dan *local strongmen* yang berhasil menancapkan kukunya lebih dalam lagi pada era reformasi adalah broker lama yang pada masa sebelumnya telah menjadi

klien penguasa orde baru. Tetapi karena kemampuannya untuk melakukan reorganisasi kekuatan, selama masa transisi menuju demokrasi, mereka berhasil memanipulasi *state of minds* publik sehingga menemukannya orang kuat lokal menjadi semakin berkuasa dan berpengaruh dibanding masa sebelumnya. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para *local strongmen* dan bos ekonomi (baca : elit ekonomi, pen) semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan (daerah) berbanding masa-masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan-jabatan penting tersebut, para broker ataupun orang kuat lokal ini selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar kebijakan resmi (yang diformulasi) menguntungkan bisnis dan posisinya. Imbal jasa para politisi kepada para broker politik tidak jarang dilandaskan pada jasa investasi politik selama berlangsungnya pilkada (bupati) dan pemilu (gubernur). Atau juga, karena mereka mau menjadi tameng penguasa apabila terjadi unjuk rasa kelompok oposisi, mahasiswa, buruh dan lain umpamanya (Agustino, 2011).

Teori perseteruan politik atau yang lebih familiar disebut dengan *The Contentious Politic* merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan dinamika konflik terkait pada perubahan-perubahan sosial sebagai respon/reaksi terhadap restrukturisasi kelembagaan politik formal ataupun informal. Motif di balik perseteruan tersebut lebih banyak mengacu kepada tujuan-tujuan atau kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok atau organisasi berbasis satu entitas identitas. Karakter utama yang ditampilkan dalam teori ini adalah suatu teknik yang menjustifikasikan penggunaan metode konflik laten maupun terbuka (kekerasan fisik) terhadap kesadaran inti

identitas kelompok yang bisa terbagi ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaan etnis, agama, kepercayaan maupun pandangan politik. Dalam ranah kehidupan sosial, penggunaan teori *Contentious Politic* sebagai teknik analisa perseteruan, baik yang bersifat laten maupun terbuka relevan dalam menjelaskan suatu perkembangan kehidupan dari dinamika kedua karakter konflik, baik yang bersifat *soft conflict* (tertutup/laten) maupun *hard conflict* (terbuka/kekerasan fisik).

Hasil akhir dari penggunaan teori ini secara general dikaitkan pada perubahan konstelasi arena politik lokal dengan berbagai macam konsesi pembentukan kekuasaan region/wilayah yang menjadi basis identitas para aktor politik berdasarkan mayoritas populasi etnis, kepercayaan dan agama tersebut berada. Solusi terbaik dari konflik ini tergantung dari muatan eskalasi konflik, jenis dan karakter konflik, berikut latar belakang terjadinya konflik, sehingga hasil akhir konflik bisa saja tidak berupa konsesi kekuasaan politik dari pihak-pihak yang bertikai, namun dimungkinkan berupa kekuasaan politik yang bersifat monolitik.

Sepanjang era 1990-an, teori ini hampir mendominasi analisa-analisa penyebab suatu Negara atau wilayah tertentu yang mengalami suatu pertikaian etnis, agama ataupun krisis identitas kebangsaan. Penggunaan teori ini sebagaimana yang diilustrasikan oleh para pengembangnya yaitu Sidney Tarrow, Charles Tilly dan Doug Kagan menekankan pada interaksi konflik di antara para aktor yang terlibat perseteruan dengan masing-masing mengklaim rasionalitas kebenaran akan latar belakang maupun tujuan tindakan menurut perspektif masing-masing. Pada saat yang bersamaan pemerintah/rezim yang berkuasa berperan sebagai target utama sasaran para aktor yang bertikai, pemrakarsa/pencipta klaim kebenaran yang menyebabkan terjadinya konflik atau aktor ketiga yang meng-

atur jalannya eskalasi konflik. Wujud nyata dari konflik perseteruan tersebut bisa berupa gerakan sosial, aksi pemogokan, dan revolusi politik. Tujuan utama dari penggunaan teori perseteruan politik sebenarnya bermotif kepada tuntutan akan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang dikonsesikan kepada pembentukan region-region kekuasaan politik berdasarkan garis etnis, agama, kesamaan kepercayaan, atau yang lebih general lagi berupa persamaan identitas keyakinan-keyakinan inti (*core of beliefs*) di antara masing-masing kelompok.

Pembahasan

Dalam perkembangan lebih lanjut, perseteruan politik melibatkan dua atau lebih kelompok-kelompok yang bertikai untuk tujuan dan kepentingan yang bermakna politis. Gambaran fenomena konflik secara horizontal dan vertikal hanyalah eksekusi pengalihan dari tujuan nyata yang sebenarnya, yaitu tuntutan keterlibatan penuh akan dominasi antar kelompok satu dengan yang lain, atau beberapa kelompok yang mendominasi populasi suatu region yang bersangkutan. Keterlibatan penuh ke dalam praktek-praktek pengambilan kebijakan politik maupun ekonomi yang berinduk pada kelembagaan legal struktural formal (legislatif, eksekutif, yudikatif). Suatu fenomena konflik politik yang dikategorikan pada perseteruan politik pada umumnya membawa simbol-simbol, nilai, budaya, maupun karakter yang menjadi ruang kebersamaan identitas inti kelompok yang bersangkutan. Ketika pada titik ini bagi kelompok pemilik identitas inti tersebut dianggap lemah, tertindas atau termaginalkan, maka pada proses selanjutnya mereka akan bergerak secara kolektif membentuk perlawanan terbuka atau tertutup terhadap aktor lain yang dianggap sebagai penyebab, sebagai contoh dimarginalkannya seperangkat identitas inti tersebut di atas. Menurut Rude (dalam

Ideology And Popular Protest), perlawanan mobilisasi kolektif ini disebut sebagai *ideology inherent*. *Ideology inherent* di dalamnya mencakup seperangkat interpretasi terhadap seperangkat nilai, simbol, budaya, karakter yang terlihat dari pola kehidupan sehari-hari kelompok identitas tersebut. Ketika sodoran *Ideologi inherent* ini dimobilisasi (disebut *derived ideology*), maka suatu masalah atau fenomena sosial tertentu yang menyangkut *ideology inherent* ini harus dibingkai sedemikian rupa sehingga mampu memberikan respon kuat bagi kelompok tersebut. Para organisator yang menyutradarai mobilisasi kolektif tersebut harus melukiskan situasinya sebagai sebuah masalah, menyodorkan solusi, dan akhirnya melontarkan seruan untuk mengangkat senjata (Snow and Benford dalam *Frame Alignment processes, micromobilization, and movement participation*). Pendengar akan merespon framing ini jika apa yang dikatakan menyentuh apa yang sudah mereka yakini di titik-titik sentral (titik nilai, simbol, budaya, ataupun karakter). Proses ini disebut *frame alignment*.

Dalam konteks aplikasi penggunaan teori ini, maka wahana eksplorasi jawaban atas eskalasi maupun sejauh mana teori ini mampu menjelaskan pola-pola hubungan perseteruan konflik dapat dikelompokkan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan inti seputar konstelasi politik lokal pada wilayah bersangkutan. Konstelasi politik lokal yang terjadi dipengaruhi oleh motif gerakan dan konteks gerakan perseteruan politik yang mengacu kepada peran *the local strongmen* melalui *invisible hands* para *stationery bandits* ataupun *roving bandits* yang hidup pada satu atau lebih dalam masing-masing *local strongmen* tersebut. Bagaimana kemunculan fenomena ini bisa terjadi? Tampaknya hal ini merupakan perpanjangan kuasa penolakan rezim orde baru terhadap eksistensi kelas maupun konflik kelas. Eksistensi kelas berlawanan

dengan pemikiran resmi paling elementer dari Orde Baru yang didasarkan pada suatu pandangan holistik dan organistik tentang hubungan negara dan masyarakat. Hubungan negara dan masyarakat saat itu berada pada kecenderungan perang ideologis sebagai jembatan penghubung konflik komunal yang bagi rezim orde baru diterjemahkan sebagai perlawanan masyarakat berbasis identitas etnis, kultural maupun keagamaan. Berdasarkan kecenderungan ideologis tersebut, maka manakala terjadi pergolakan sipil yang memperlihatkan dimensi sosial-ekonomi atau kelas di masa orde baru, penjelasan resmi selalu menghubungkannya dengan soal yang semata-mata etnis atau keagamaan (Hadiz, 2005). Penolakan terhadap konsep konflik berbasis kelas seyogyanya tidak dilihat sebagai akibat dari ketidakcocokan kultural Bangsa Indonesia yang inheren terhadap konsep tersebut. Penolakan itu justru lebih merupakan pertanda adanya agenda-agenda negara, di mana para pejabatnya telah mengembangkan kepentingan pribadi terhadap proses pembangunan ekonomi yang jalin menjalin sedemikian rupa dengan kemunculan kaum borjuis lokal yang dipupuk oleh kebijakan negara di bidang industri dan keuangan (*baca* : aliansi birokratik-politik dan bisnis yang tergabung menjadi oligarki kapitalis; *pen*). Konstelasi politik dalam ranah dinamika *contentious politic* dipengaruhi oleh faktor lokal yang terbentuk dari pengaruh motif (konten) gerakan perseteruan dan konteks gerakannya. Sebagai contoh penerapannya dapat dijelaskan sebagai salah satunya adalah seperti Bagaimana efek dinamika politik daerah terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. Memahami efek dinamika politik daerah atau lokal bisa ditemukan ketika jawaban atas motif gerakan perseteruan dan konteks

gerakannya sebagai dua faktor yang berdampak pada konsolidasi demokrasi politik lokal terhadap pemetaan akan jawaban sejauh mana konstelasi politik lokal membawa eskalasi *contentious politic* kepada tata konsolidasi demokrasi lokal yang diinginkan oleh pihak-pihak yang saling berseteru. Motif gerakan bisa bervariasi yang diambil dari masing-masing motif (konten) yang disinergikan pada masing-masing konteks pergerakannya. Jawaban atas motif dan konteks gerakan, sebagai contoh bisa diambil ketika identitas-identitas etnis bisa dipolitisir oleh para aktor *free rider* yang memanfaatkan keprimordialan etnis tertentu yang dikemas dalam wujud *ideology inherent* sebagai hasil *framing* terhadap fenomena momen kejadian tertentu yang memicu perseteruan politik. Setelah di-*framing* dalam kemasan *ideology inherent*, maka hal ini diangkat sebagai *derived ideology* yang menghasilkan konteks gerakan perseteruan, yang dalam hal ini sebagai sampelnya adalah kebutuhan dan tuntutan akan aktor-aktor politik baru mewakili klaim identitas etnis masing-masing. Klaim identitas etnis masing-masing yang sebelumnya tidak dipolitisir, menjadi suatu entitas kekuatan politik dalam merubah konstelasi kekuatan-kekuatan unsur politik lokal yang sebelumnya didominasi oleh satu atau beberapa unsur/kekuatan politik sebelumnya. *Framing* merupakan sebuah piranti analitis yang memberikan gambaran terhadap arti kejadian-kejadian kontemporer tertentu dengan jalan membangun seperangkat kepercayaan-kepercayaan umum inti. Snow dan Banford mengemukakan *framing* ini dalam rangka memenangkan pertempuran atas “arti”.

Tabel
Berbagai Pertanyaan Seputar Tipologi Konstelasi Politik Lokal Yang Dipengaruhi Oleh Motif dan Konteks Gerakan Perseteruan Politik

Konstelasi Politik Lokal (A) = (B) + (C)	Motif Gerakan Perseteruan Politik (B)	Konteks Gerakan Perseteruan Politik (C)
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pola dinamika politik lokal 	<p>Benar tidak kegeraman masyarakat di jalanan sesungguhnya melebihi apa yang bisa dijelaskan hanya sekedar sebagai alat pencapaian kepentingan kaum elit lokal. (resistensi kelompok masyarakat di jalanan memiliki makna lebih dari sekedar alat pencapaian kepentingan kaum elit lokal)</p>	<p>Perasaan populer dan kenapa para pengikut mau turut serta (contoh : konflik etnis kalbar)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada pola tertentu yang muncul dari berbagai daerah 	<p>Warga negara biasa tampak kurang tergerak oleh keluhan tentang beratnya tekanan ekonomi daripada rasa terkoyaknya identitas (why)</p>	<p>Kepentingan kelas vs kepentingan komunal (contoh : konflik Poso)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana efek dinamika politik daerah terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat daerah 	<p>Bukankah orang berbuat sesuatu lebih karena ketakutan dibanding karena mencium sebuah peluang politis?</p>	<p>Motivasi Ketakutan daripada mencium peluang politik (contoh : kasus Ambon)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aktor seperti apa yang cenderung menguasai politik lokal? Institusi macam apa yang menjadi kendaraan politik elit lokal 	<p>Bagaimana mungkin para elit lokal yang dulu begitu pasif dan dengan patuh mengikuti perintah penguasa Orba, kemudian mendadak menjadi musuh bebuyutan setelah tahun 1987 ?</p>	<p>Kaum elit lokal yang suatu saat menjadi pengikut pasif dan di lain waktu adalah serigala bagi satu sama lain . (contoh : Maluku Utara, Kalteng).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada polarisasi, friksi atau konflik yang merupakan fungsi dari struktur tradisi dan kultur lokal • Apakah jaringan politik berbasis cultural bisa membentuk aliansi politik dominan di tingkat lokal 	<p>Bukankah identitas-identitas etnik sangat sulit dipolitisir pada tahun sebelum semua terjadi, dan jika benar, bagaimana mungkin mereka begitu mudah digerakkan pasca 1998?</p>	<p>Melejitnya secara tiba-tiba berbagai identitas yang sebelumnya tidak dipolitisir, pembentukan aktor-aktor baru. (contoh : Kalteng dan Kalbar)</p>

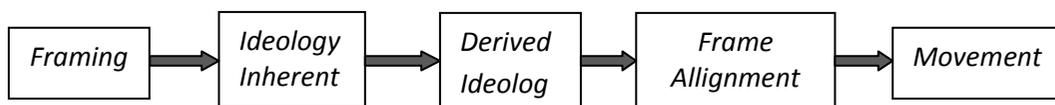
Sumber : diolah dari Baswedan, 2007 dan Klinken, 2010.

Pertempuran arti adalah makna yang berinteraksi dengan bangunan seperangkat kepercayaan-kepercayaan inti yang hidup dalam identitas kelompok tertentu. Dalam uraian selanjutnya Snow dan Banford mengaitkan *framing* ini dengan upaya para pelaku perubahan

mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui membuat framing masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Ini sebuah cara untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong mendesakkan sebuah

perubahan. Snow dan Benford, lebih lanjut, menekankan dua komponen penting dalam mem-*framing* gerakan, yaitu diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya dan prediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut. (Situmorang, 2007). Dalam *contentious politic*, *framing* ini menghasilkan pigura terhadap bangunan kepercayaan yang disebut *Ideologi Inherent*. Contoh deskripsi *ideologi inherent* dapat dilukiskan sebagai sebuah kelompok yang homogen, yang memiliki hak-hak teritorial yang terbelenggu akibat kelompok-kelompok pendatang baru. Ideologi ini juga meliputi kepercayaan bahwa seluruh lingkungan makro menganggap orang-orang yang masuk dalam kelompok homogen itu terbelakang, primitif, atau keduanya. Mereka pada satu

fase tertentu bisa menunjukkan kebuasan yang mengherankan, dan juga sekaligus mengagumkan jika diprovokasi. *ideology inherent* dipakai oleh para organisator gerakan sebagai seperangkat interpretasi mobilisasi yang disebut *Derived Ideology* atau *frame*. Tugas inti *derived ideology* adalah mem-*frame* setiap permasalahan kontemporer sedemikian rupa sehingga masalah itu bergaung bagi pendengarnya. Para organisator harus melukiskan situasinya sebagai sebuah masalah, menyodorkan sebuah solusi dan akhirnya melontarkan seruan untuk melakukan kekerasan represif. Pendengar akan merespon *framing* ini jika apa yang dikatakannya menyentuh apa yang sudah mereka yakini di titik-titik sentral. Proses ini disebut *Frame Allignment* (Klinken, 2010 : 115-116).



Gambar 1
Fase Pembentukan *Contentious Politic*

Sesuai definisi awal oleh para pencetusnya, *Contentious Politic* melibatkan dua atau lebih aktor yang terikat dalam perseteruan politik baik terbuka ataupun tertutup. Pengertian aktor ketiga, yaitu *government* tidak selalu identik mewakili lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang formal yuridis. Unsur-unsur pembentuk elit politik di tingkat infrastruktur dan suprasuktur seperti parpol, NGO, *pressure group* (oposisi) atau organisasi-organisasi berbasis kultural yang memiliki potensi sumber daya dan akses sumber daya politik dan ekonomi juga memiliki kapasitas yang sama sebagai aktor diluar kedua aktor yang secara eksplisit terlibat. Sekalipun misalnya terdapat aktor

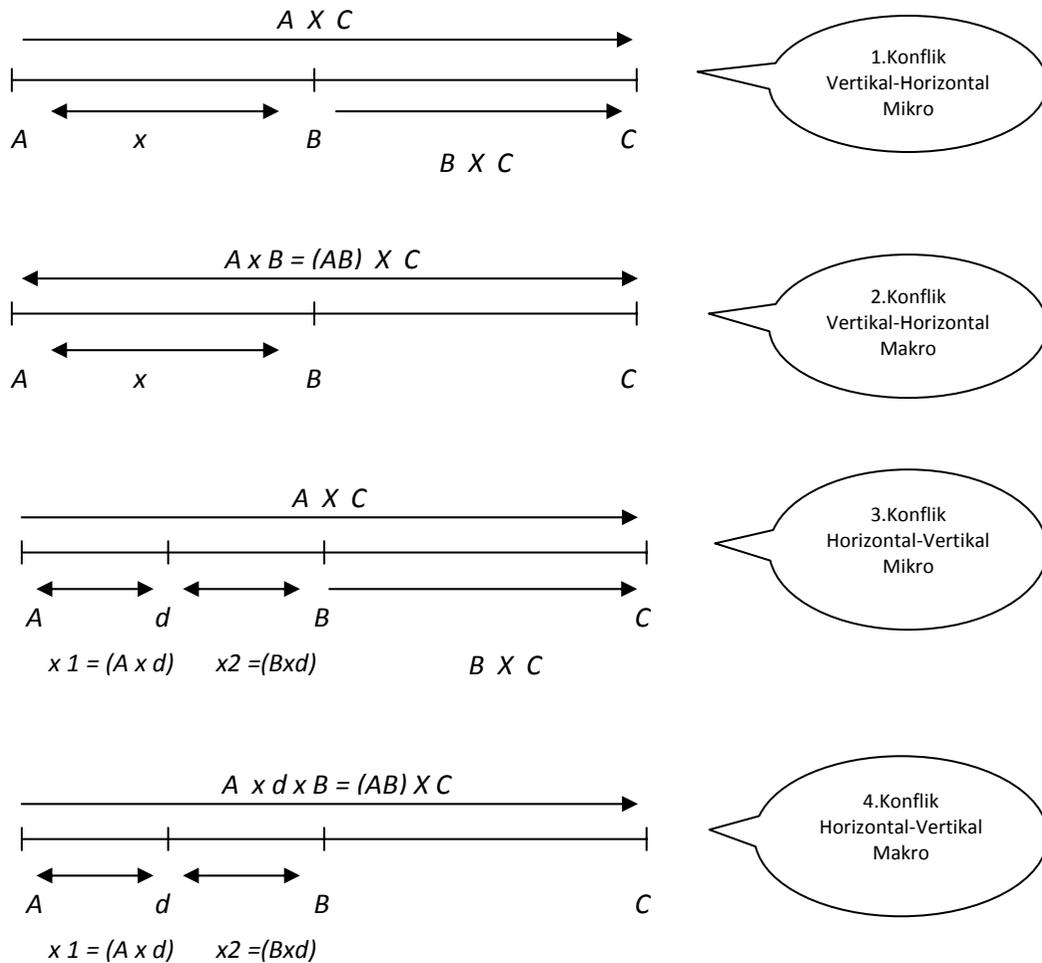
keempat, namun peranannya lebih banyak berfungsi sebagai obyek perseteruan dari aktor-aktor lain yang lebih kuat secara populasi maupun organisasinya. Dengan demikian hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan eksistensi dari semua aktor yang sebenarnya masuk dalam kategori *local strongmen*.

Dengan kata lain aktor-aktor yang terlibat dalam perseteruan politik menggeneralisir keberadaan lingkungan konfliknya pada dua ranah konflik yang secara resiprok saling berdiri pada dua kepentingan, yaitu kepentingan ranah *centre* – ranah *periphery*, contohnya seperti benturan kepentingan antara pusat dan daerah. Baik pusat (*center*) maupun daerah (*periphery*)

masing-masing membawa *derived ideology* sebagai alat justifikasi klaim pembenaran mereka atas kemunculan gerakan perseteruan yang bermuatan politis.

Dengan demikian dalam narasi kontestasi perseteruan/konflik melalui fra-

me konsolidasi demokrasi politik lokal, maka gambaran detail tentang deskripsi jalannya konflik dapat diuraikan melalui beberapa tipologi konflik pada gambar di bawah ini. Kesemuanya bermuara dari deskripsi tabel tipologi konstelasi politik di atas :



Gambar 2
Tipologi Konflik Dalam Perseteruan Politik

Keterangan skema :

A, B, C = Aktor Makro
d = Aktor Mikro

X = Konflik Makro
x = Konflik Mikro

Konflik Vertikal-Horizontal Mikro dan Makro

Konflik Vertikal-Horizontal Mikro

Pada tipe konflik ini, Konflik horizontal yang terjadi bersifat mikro karena target utama sasaran sebenarnya adalah konflik vertikal terhadap aktor ketiga (*government*). Terjadinya konflik disebabkan karena kebijakan-kebijakan *government* yang populis ternyata lebih banyak memuaskan aktor lain (A atau B), sehingga mengakibatkan mereka saling bertikai (*hard conflict*) yang berujung pada satu sama lain saling berebut raihan tuntutan akan kebutuhan konsesi akhir dari solusi akhir konflik (disimbolkan $A \times C$ dan $B \times C$). Sumber pertikaian lain bisa saja berupa disparitas akses sumber daya politik atau ekonomi yang hanya dinikmati oleh salah satu aktor, yang pada intinya tetap disebabkan oleh mis-management tata kelola kebijakan ataupun sumber daya politik atau ekonomi oleh *government/organisasi/ kelompok/institusi*.

Konflik Vertikal-Horizontal Makro

Tipe konflik vertikal-Horizontal terjadi karena kedua belah pihak/aktor yang terlibat langsung dalam konflik (*hard conflict*), sama-sama mengalami dampak langsung dari kebijakan-kebijakan tertentu atau disparitas akses sumber daya politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan karena lebih banyak dinikmati oleh aktor/pihak lain. Sebagai efek makro lanjutnya adalah konflik terbuka terhadap *government* (vertikal). Bentuk solusi terakhir terhadap segala tuntutan yang menjadi sumber konflik adalah dengan dipenuhinya berbagai macam konsesi mutualisma yang ditawarkan kepada *government*. Ada dua karakter dasar dalam konteks berjalannya konflik horizontal (disimbolkan dengan $A \times B$), bahwa konflik terbuka bisa terjadi begitu saja sebagai bentuk laten yang menemukan sendiri momentum ledakannya

berwujud *hard conflict*. Atau bisa saja dimungkinkan oleh kesepakatan bersama oleh kedua aktor yang dengan sengaja untuk melibatkan dirinya ke dalam konflik komunal terbuka atau tertutup sebagai bentuk konflik terselubung yang semata-mata hanya diarahkan kepada tujuan konflik vertikal terbuka secara makro dengan sasaran *government* { (AB) X C }.

Dari segi tipologi konflik vertikal-horizontal mikro dan makro meng-konvert suatu bentuk jawaban atas konflik horizontal yang terjadi sebagai bentuk respon atas ketidakpuasan terhadap eskalasi konflik vertikal yang belum menemukan satu titik konsesi yang dikehendaki oleh semua aktor/pihak yang terlibat pertikaian skala mikro maupun makro. Dengan kata lain, konflik vertikal direspon secara mikro maupun makro oleh konflik horizontal (baik *soft conflict* ataupun *hard conflict*) sebagai akses realisasi logis masif asimetrik konflik yang belum menemukan sintesa mutualisma *problem-solving*. Suatu akses realisasi *problem-solving* terhadap parameter-parameter resolusi konflik yang berkoheren dengan perjuangan merebut kekuasaan politik pada segala akses dan akses otoritas dan wewenang kekuasaan-kekuasaan lainnya (Duverger, 2000) menempatkan elemen-elemen perjuangan merebut kekuasaan politik ini dalam wujud individu maupun kelompok ke dalam pertentangan/perseteraan politik pada persaingan untuk menempatkan individu-individu dalam portofolio cabinet, kursi parlementer, pos untuk menjadi *perfect*, bintang-bintang jenderal, topi cardinal, dan seterusnya. Di dalam kumpulan manusia yang besar, konflik-konflik individual ini dilipatgandakan oleh konflik-konflik universal antara kelompok di dalam masyarakat, seperti ras, kelas, komunitas, lokal korporasi-korporasi, bangsa-bangsa dan seterusnya.

Konflik Horizontal-Vertikal Mikro dan Makro

Konflik Horizontal-Vertikal Mikro

Pola tipe konflik horizontal-vertikal mikro sebenarnya tidak secara langsung melibatkan dua belah pihak yang bertikai. Artinya konflik keduanya tidak bersifat simetris dalam mengartikulasikan segala tuntutan dan kepentingan mereka dalam frontalisasi arena politik. Deskripsi paling jelas yang mewakili jenis konflik horizontal-vertikal mikro adalah ketika justru pemicu konflik berawal dari keberadaan aktor mikro (simbol: d) yang memiliki akses penguasaan sumber daya lokal terhadap aspek-aspek tertentu yang bernilai *valuable* sebagai variabel *survival sources*, misalnya sumber daya ekonomi. Dan juga aktor tersebut memiliki karakter identitas personal atau kelompok yang kuat sekalipun populasinya rendah. Hal ini bisa diartikan bahwa kelompok yang mewakili identitas aktor tersebut membawa *ideology inherent* yang sensitif dan rentan sebagai pemicu terjadinya konflik horizontal. Konflik horizontal yang memicu terjadinya *asimetric hard conflict* kelompok/identitas kelompok tersebut terhadap aktor-aktor lain yaitu A dan B, dimana mereka juga saling bertolak belakang secara sosial dan kultural. Hal ini digambarkan pada jenis tipologi konflik nomor tiga (A x d x B). Subyek klaim dari tuntutan dan kepentingan aktor A dan B sekalipun bersifat laten sebenarnya diarahkan kepada aktor C (government, organisasi, kelompok atau institusi).

Konflik Horizontal-Vertikal Makro

Karakteristik konflik horizontal-vertikal makro sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang bertipikal mikro. Bersifat asimetris terhadap realisasi tuntutan dan kepentingan mereka sehingga tidak berjalan secara frontal. Pemicu konflik horizontal-vertikal makro adalah kemunculan aktor lain (d) yang menguasai sumber daya lokal

dan berkarakter identitas sosial yang kuat. Populasinya kurang lebih sama dengan yang berskala mikro. *Ideology inherent* tetap menjadi pemicu utama terjadinya *asimetric hard conflict* kelompok/identitas kelompok tersebut terhadap aktor A dan B. (A x d x B). Subyek klaim dari tuntutan dan kepentingan aktor A dan B sekalipun bersifat laten, namun bisa saja terjadi secara terbuka terhadap aktor C (government, organisasi, kelompok atau institusi).

Konflik horizontal-vertikal makro mengindikasikan motif dan konteks gerakan dari aktor A dan B yang sama-sama bergabung melawan aktor C. Namun diperlukan aktor lain yang lebih kuat secara ekonomis sebagai *the excuse conflict* terhadap aktor A dan B. Hal tersebut perlu dilakukan agar eskalasi konflik tidak begitu terbuka mengarah kepada kekerasan fisik terhadap aktor C. Walaupun demikian tidak menjamin bahwa dengan cara tersebut stabilitas situasi dan kondisi terhadap resolusi konflik bisa terjadi ke arah yang diinginkan semua pihak yang terlibat konflik (AB X C).

Skema tipologi konflik di atas merupakan terjemahan dari konstelasi politik lokal yang dipengaruhi oleh konteks gerakan dan motif gerakan membutuhkan beberapa mekanisme yang mempengaruhi ketegangan politik. *Pertama*, adalah mekanisme lingkungan. Di dalam mekanisme ini, faktor eksternal memainkan peranan penting mempengaruhi kehidupan sosial. Menurut, McCarthy dan Zald penipisan sumber daya adalah salah satu contoh mekanisme lingkungan orang terlibat dalam ketegangan politik. *Kedua*, adalah mekanisme kognitif. Mekanisme ini bekerja melalui perubahan di tubuh individu-individu dan persepsi kolektif seperti kata yang diakui atau pemahaman akan realitas. *Ketiga*, adalah mekanisme relasi. Mekanisme ini beroperasi dengan cara menjembatani organisasi, individu dan masyarakat. Mereka menunjukkan perantara atau broker sebagai

contoh konkret mekanisme ini. Lazimnya setiap ketegangan politik selalu melibatkan ketiga mekanisme di atas. Paling tidak ada tiga mekanisme dan proses yang secara operasional bisa dipergunakan dalam menjelaskan ketegangan politik. Mekanisme pertama adalah lingkaran kesempatan dan kendala beroperasi melalui rentetan perubahan lingkungan, interpretasi perubahan, melakukan aksi dan aksi balasan. Mekanisme kedua adalah peran perantara yang mencoba menghubungkan, dua atau lebih, lokasi-lokasi sosial yang belum berhubungan. Sedangkan mekanisme ketiga adalah pembentukan kategori. Pembentukan kategori menciptakan identitas. Sebuah kategori menciptakan identitas. Sebuah kategori sosial terdiri dari sekumpulan perbedaan yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kesimpulan

Perkembangan otonomi daerah mencerminkan suatu konsolidasi demokrasi yang *defected* pada periode sebelumnya. Bersamaan dengan bergulirnya arus reformasi politik 1998, konsolidasi demokrasi ditandai dengan pergeseran *state formation* dan *social formation* di tingkat lokal maupun nasional. Pergeseran *state formation* adalah tata hubungan kekuasaan antar institusi politik utama ke arah sistem parlementariaisme, maupun antar pusat (*centre*) dengan daerah (*periphery*). Pasca orde baru, Kredibilitas negara dan institusinya mengalami penurunan legitimasi kekuasaan. Penyebabnya adalah rejitimasi masa orde baru yang memarginalkan hubungan peran warga dengan *state-society*. Marginalisasi juga terjadi pada komunitas lokal (masyarakat adat) di daerah. Sebagai efek marginalisasi, terjadi perluasan fragmentasi dalam keseluruhan arena institusi kenegaraan sebagai dampak pertumbuhan kontestasi aktor-aktor politik. Dengan demikian lahirlah *sinisme* dan *distrust* terhadap negara

dan institusinya. Bermodal *sinisme* dan *distrust* terhadap negara dan institusinya, daerah melakukan *re-positioning* hubungan dengan pusat. Dampaknya terjadi konflik antar pusat-daerah dalam berbagai domain, seperti ekonomi, sumber daya politik dan kebudayaan. Kekuatan simbolik dengan format konstruksi budaya digunakan daerah yang berbasiskan pada *atavisme* (mencari pada sejarah masa lalu) dan *indigenisme* (kesamaan geneologis) dalam rangka memperkuat posisi konfliknya terhadap pusat. Dalam konteks demokratisasi, *re-positioning* ini merupakan suatu bentuk konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Salah satu teori konflik yang dibangun dalam rangka *re-positioning* ini adalah dengan penggunaan *The Contentious Politic Theory*. Penggunaan teori ini merupakan reaksi dari perubahan-perubahan sosial terhadap restrukturisasi kelembagaan politik formal ataupun informal berbasis kelompok atau berdasarkan kesamaan etnis, agama, kepercayaan maupun pandangan politik. Teori *Contentious Politic* merupakan bagian dari teknik analisa penyebab dan tujuan terjadinya perseteruan politik, baik yang bersifat laten maupun terbuka dalam perkembangan dinamika kehidupan karakter konflik, baik *soft conflict* (tertutup/laten) maupun *hard conflict* (terbuka/kekerasan fisik). Tujuan akhir dari penggunaan teori ini secara general adalah perubahan konstelasi arena politik lokal dengan berbagai macam konsesi pembentukan kekuasaan region/wilayah yang menjadi basis identitas para aktor politik berdasarkan mayoritas populasi etnis, kepercayaan dan agama, dan yang bersifat monolitik. Konstelasi arena politik lokal dalam konteks konsolidasi demokrasi lokal, eksistensinya juga ditentukan oleh para aktor lokal (*local strongment*) yang terlibat dalam *contentious politics*. Aktor pertama, *civil society*. Kedua, Peran birokrat. Ketiga, peran elit ekonomi lokal dan nasional. Dalam

eksistensinya, ketiga aktor lokal tersebut menjelma dalam bentuk *stationery bandits* dan *roving bandits* dalam arena perebutan *sphere of influence* untuk menciptakan dan mengendalikan *state formation* dan *social formation* pada aras demokrasi lokal fase konsolidasi demokrasi. Dengan mengambil konsep Konstelasi Politik yang dipengaruhi oleh faktor motif dan konteks gerakan perseteruan, maka fase pembentukan dan skema perkembangan konflik dalam *Contentious Politic* meliputi :

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, “Sisi Gelap Otonomi Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi”, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Baswedan, Anies, “Kata Pengantar”, Dalam: Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken, Politik Lokal Di Indonesia, KITLV&Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Dwipayana, AAGN Ari, “Desa Adat: Antara Otentisitas Dan Demokrasi”, Dalam Abdul Gaffar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Duverger, Maurice, “Sosiologi Politik”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hadi, Kisno, “Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah”, Dalam AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi Dan Prospek, Jurnal Ilmu Politik, Vol 21, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Maliki, Zainudin, “Sosiologi Politik :Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Klinken, G, Van, “Perang Kota Kecil : kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia”, KITLV – Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Situmorang, Abdul Wahib, “Gerakan Sosial: Studi kasus Beberapa Perlawanan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.